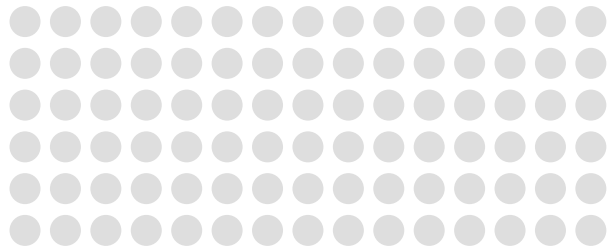
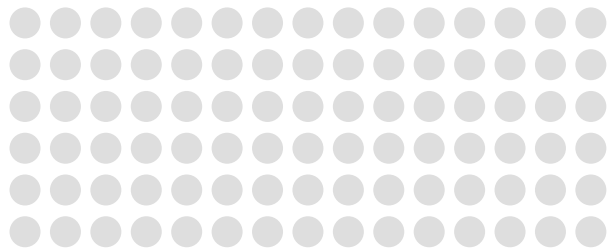


LAPORAN TAHUNAN 2004-2005



MEMBERI MAKNA BAGI PARTISIPASI PUBLIK



Y A P P I K A

Daftar Isi :

Pengantar dari Dewan Pengurus YAPPIKA	
= Misi dan Program Strategis "baru" Yappika	1
Pengantar dari Direktur Eksekutif YAPPIKA	
= Partisipasi untuk Demokrasi	4
 Gerakan Publik Untuk Perubahan	
- Merajut hubungan "konstituensi" DPD dan rakyat	6
- Terus memperjuangkan "partisipasi masyarakat"	7
- Geliat gerakan warga DAS Lamasi, Luwu - Sulawesi Selatan	9
- Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Teluk Palu yang Adil dan Demokratis : antara negosiasi dan kolaborasi	10
 Semangat Relawan & Geliat Nurani	
- Kesukarelawanan Tanggap bencana Gempa dan Tsunami Aceh	11
- Menggulirkan isu Pluralisme dalam Buku agenda 2005	12
- RakkFest 2004 : Bangun Solidaritas dalam Keberagaman Kita	12
- Relawan : Sebuah energi lepas yang perlu di tangkap	13
- Peluncuran buku seri Konflik untuk kelas menengah	14
 Menembus Ruang Menggapai Harapan	
- Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pemilu di Naggroe Aceh Darussalam	15
- Pohon Harapan dari Aceh, Bulukumba dan Tual untuk Presiden di Pemilu 2004	16
- Upaya penguatan Masyarakat Sipil di 8 kabupaten melalui pelaksanaan Indeks Masyarakat Sipil	17
 Berbagi Membangun Kekuatan Bersama	
- Presentasi karya ilmiah kajian Kebijakan di Komisi Hukum Nasional Indonesia	19
- Komparasi studi penyusunan anggaran dan perencanaan Pembangunan	19
- Penerbitan buku Anti korupsi dan malapetaka sampah	20
- Refleksi dan berbagi Informasi dalam pertemuan Mitra Yappika	21
 Galery Aktivitas Yappika	
Kanada, Jepang, Kampanye Anti Penyiksaan	21
 Keuangan	
Statement Auditor, Hasil Audit 2004 & Laporan keuangan	22

Misi dan Program Strategis “Baru” YAPPIKA

Pengantar dari Dewan Pengurus

Sudah menjadi tradisi yang dikembangkan di dalam organisasi YAPPIKA bahwa sekurang-kurangnya setiap empat tahun sekali diselenggarakan suatu Perencanaan Strategis (Strategic Planning). Perencanaan strategis dipandang selalu dibutuhkan oleh YAPPIKA untuk memperbincangkan kembali apakah visi, misi dan program-program strategis organisasi yang dirumuskan empat tahun yang lalu perlu dilanjutkan karena masih relevan, atau perlu mengalami perubahan atau perombakan sama sekali. Perencanaan strategis YAPPIKA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1997 ketika masih berada di bawah rezim Orde Baru. Ketika itu mulai dirumuskan komitmen-komitmen YAPPIKA untuk memberikan kontribusinya kepada demokrasi dan penguatan masyarakat sipil (civil society) dengan menetapkan YAPPIKA sebagai “aliansi masyarakat sipil untuk demokrasi”.



Rustam Ibrahim

Perencanaan Strategis tahun 2000 diselenggarakan setelah terjadinya perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam kehidupan bernegara. Dengan jatuhnya pemerintah Soeharto kebebasan-kebebasan dasar warganegara mulai diakui dan Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi. Perencanaan strategis 2004 lebih menegaskan karakteristik YAPPIKA sebagai LSM yang bergerak dalam bidang advokasi. Demikian pula perencanaan strategis yang berlangsung pada 14-18 Desember 2004 berlangsung dalam suasana Indonesia yang baru selesai menyelenggarakan Pemilu legislatif dan, untuk pertama kalinya, pemilihan presiden secara langsung. Keadaan ini dipandang sebagai berakhirnya era transisi ke demokrasi menuju ke arah konsolidasi demokrasi. Di pihak lain sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan belum banyak perubahan keadaan ekonomi Indonesia terutama pada tingkat mikro, pada tingkat kehidupan nyata rakyat Indonesia.

Sebelum perencanaan strategis tahun 2004 diselenggarakan, terlebih dahulu dikumpulkan pandangan-pandangan dari sejumlah tokoh yang mewakili stakeholders mengenai peran masa depan YAPPIKA. Pandangan-pandangan ini kemudian di bawa ke dalam suatu refleksi yang diikuti oleh dewan pengurus, eksekutif dan semua staf mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan dan bagaimana YAPPIKA akan menempatkan dirinya.

Dalam bidang politik dan demokrasi, Indonesia dinilai mengalami kemajuan dalam mempraktekkan demokrasi prosedural. Ini ditandai dengan lahirnya institusi-institusi yang mendukung prosedur demokrasi seperti partai politik, DPR/DPRD, pemilihan

umum, pers yang bebas dan lain-lain yang mulai bekerja secara efektif. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana dengan substansi demokrasi itu sendiri? Bagaimana dengan kinerja institusi-institusi pendukung demokrasi? Otonomi daerah, misalnya, dilihat dari demokrasi prosedural sudah berjalan di arah yang benar. Pilkada langsung merupakan kemajuan yang berarti dilihat dari segi demokrasi prosedural. Akan tetapi dibayangkan Pilkada akan menghadapi potensi konflik yang sangat tinggi, baik dilihat dari akar konflik seperti masalah suku, etnis dan agama, maupun dalam intensitas konflik itu sendiri serta masih kuatnya permainan "politik uang".

Dalam bidang ekonomi, Indonesia sedang mengalami tingkat pengangguran terbuka yang sangat serius yang mencapai 10% angkatan kerja atau lebih dari 10 juta orang. Meskipun dibayangkan pertumbuhan ekonomi akan lebih baik tetapi perkembangan investasi masih sangat memprihatinkan. Ekonomi memang tidak akan dapat bergerak tanpa investasi, akan tetapi juga disadari investasi saja belum tentu langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat kebanyakan. Sektor formal hanya menyerap 1/3 tenaga kerja yang bergantung pada upah dari investasi, sedangkan yang 2/3 bekerja di sektor non-formal yang tidak tergantung investasi. Pertumbuhan 5-6% mungkin tercapai pada 2005, tetapi itu belum cukup untuk menyerap pengangguran yang semakin bertambah, dan pada gilirannya akan melunturkan harapan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah juga akan menghadapi tantangan kenaikan harga minyak bumi yang membubung tinggi yang akan sangat banyak menyerap anggaran belanja negara. Dibayangkan pula bahwa pemerintah masih tetap sibuk dengan masalah-masalah makro, masalah besar dari perekonomian sehingga persoalan-persoalan rakyat kebanyakan tidak akan banyak tersentuh.

Dengan refleksi seperti ini apa kemudian yang menjadi peran YAPPIKA? Ada yang mengusulkan bahwa YAPPIKA perlu memainkan peran dengan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai strategi, pola dan arah manajemen penyelesaian konflik serta melakukan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pilihan strategi, pola dan arah yang akan dikembangkan dalam mengatasi konflik tersebut, khususnya dengan kalangan OMS/LSM lokal.

YAPPIKA juga diinginkan berperan dalam menumbuhkan demokrasi partisipatif dan substantif terutama pada tingkat lokal. Bagaimana menggalang partisipasi politik warga negara di semua sektor secara terus menerus? Bagaimana mengubah perilaku rakyat yang sekedar menjadi pemilih (voters) menjadi warganegara (citizens) yang aktif? YAPPIKA juga perlu berperan dalam upaya-upaya menanggulangi kemiskinan, karena itu masih merupakan basis persoalan masyarakat yang paling utama.

Walhasil, sesuai dengan mandat awalnya untuk mendukung penguatan OMS di Indonesia, Perencanaan Strategis 2004 merumuskan kembali misi dan isu-isu strategis yang akan menjadi tema program-program 2004-2007 sebagai berikut:

1. Penegakan hak asasi manusia (HAM) dan kedaulatan rakyat.
2. Transformasi sosial dan ekonomi berbasis rakyat, adil, mandiri dan setara.
3. Penghapusan segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, ideologi, suku, ras, dan gender.

Ketiga misi ini akan diperjuangkan melalui advokasi kebijakan, penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan kampanye publik, dan dijabarkan ke dalam 4 isu strategis:

1. Menuntut tanggungjawab Negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
2. Membangun perdamaian dan peningkatan kesejahteraan rakyat
3. Membangun tata pemerintahan lokal yang demokratis (*democratic local governance*), dan
4. Membangun warga Negara yang aktif.

Tentu saja misi dan dengan isu-isu strategis ini hanya akan dapat diupayakan pencapaiannya oleh YAPPIKA jika didukung oleh semua stakeholders, khususnya OMS/LSM mitra YAPPIKA dan kelompok-kelompok partisipannya di 27 kabupaten/kota di 7 provinsi yang menjadi wilayah kerja YAPPIKA. Semoga!

Hinca Panjaitan

Direktur Eksekutif IMLPC (Indonesian Media Law Policy Center)

- Yappika menjadi lebih dikenal setelah tragedy Tsunami di Aceh. Pada saat itulah program *strenghtening civil society* yang menjadi concern Yappika selama ini menjadi lebih terlihat. Tragedy Tsunami bukanlah sebuah program yang direncanakan, oleh karenanya penguatan Civil Society oleh Yappika menjadi lebih matang karena langsung diuji.
- Hal lain yang membuat Yappika layak mendapat perhatian dari publik adalah keberaniannya mengambil posisi dalam program Pemilu 2004 di Aceh. Begitu banyak orang ataupun organisasi mempertanyakan keputusan tersebut, bahkan menimbulkan pro dan kontra mengingat situasi di Aceh ketika itu. Sebagian berpendapat Pemilu tidak akan dapat berlangsung jika masih ada intimidasi dari penguasa darurat di Aceh, serta masih banyak pendapat lainnya.
- Kalau mau digambarkan, sebenarnya Yappika telah berhasil melahirkan penari-penari, namun sayangnya tidak menyediakan pentas bagi para penari tersebut. Buktinya, isu-isu yang diusung oleh Yappika selalu menjadi sorotan banyak orang, tetapi keberhasilan-keberhasilannya hanya diketahui oleh kalangan komunitas NGO saja karena tidak di publikasikan dan sedikit diekspose media. Oleh karenanya, ke depan di Yappika harus ada ahli strategi media dan juga menyediakan pentas bagi penarinya.

Partisipasi Untuk Demokrasi

Pengantar dari Direktur Eksekutif

*"tak ada ancaman yang lebih besar bagi demokrasi
ketimbang ketidak-pedulian dan kepasifan warga"*
Bronislaw Geremek



Lili Hasanuddin

Demokrasi merupakan sistem politik dimana terdapat mekanisme yang menjadikan pemerintah responsif terhadap berbagai keinginan, pilihan dan kepentingan rakyat. Harus tersedia ruang bagi rakyat untuk mempengaruhi kebijakan serta untuk terus mencermati dan mengawasi penerapan kekuasaan negara, baik selama Pemilu maupun diantara Pemilu yang satu dengan berikutnya. Para elit penguasa pun harus memiliki akuntabilitas kepada rakyat yang telah memilihnya. Penyalahgunaan kekuasaan, biasanya tumbuh subur dalam selubung kerahasiaan dan prosedur-prosedur yang buram dan tak dapat dijangkau rakyat.

Bagaimana situasi Indonesia paska Pemilu 2004? Bila melihatnya pada tataran formal orang bisa saja menganggap jalur yang dibuat sudah mengarah pada pembangunan demokrasi. Apalagi bila melihat pemerintahan baru begitu giat membentuk berbagai komisi independen, seperti komisi penyiaran, komisi pemberantasan korupsi dan komisi kepolisian. Tetapi, kita akan terkecoh jika ukurannya hanya sebatas itu. Fenomena yang terpampang masih menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan substansi prinsip-prinsip negara demokratis. Korupsi masih merajalela, bahkan ironisnya, terjadi pula di Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah komisi independen yang seharusnya menjadi motor penggerak demokrasi. Pelayanan publik pun berada pada titik terjauh dari jangkauan masyarakat yang membutuhkan. Ledakan busung lapar, mewabahnya penyakit polio dan demam berdarah, serta sulitnya penduduk miskin mengikuti pendidikan adalah beberapa bukti kongkrit betapa rendahnya kualitas pemerintah dalam melayani pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat bawah.

Dalam konteks Indonesia seperti itulah, kami di Yappika menggulirkan program dan berbagai kegiatan sepanjang tahun 2004. Kami berusaha terus mengawal konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan sebanyak mungkin mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai cara dan media. Strategi yang kami kembangkan adalah membangun kesadaran masyarakat untuk aktif dan peduli atas hak-hak mereka, sekaligus kritis mensikapi perkembangan yang berlangsung di sekitarnya. Pada saat pelaksanaan Pemilu, misalnya, serangkaian kegiatan pendidikan pemilih kami selenggarakan hingga ke pelosok-pelosok desa pada 5 kabupaten di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kegiatan ini kami lengkapi pula dengan kampanye melalui media massa agar masyarakat Aceh dapat menggunakan hak-haknya meskipun berada dalam status darurat militer. Selain itu, bersama dengan beberapa lembaga di tingkat lokal, kami pun melatih masyarakat dan melibatkan mereka sebagai pemantau Pemilu di daerahnya masing-masing.

Dalam proses penyusunan kebijakan di tingkat nasional, kami terus mencermati proses-proses legislasi yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sipil. Selain melakukan lobby secara intensif kepada anggota legislatif, kami pun menyelenggarakan serangkaian publik forum di beberapa daerah dengan menghadirkan anggota DPR-RI. Dalam setiap publik forum, kami mengundang masyarakat setempat agar aspirasi mereka langsung didengar anggota legislatif yang hadir, dan diharapkan dapat mewarnai rumusan pasal-pasal yang sedang dibahas.

Pada saat bencana tsunami menerpa Aceh dan Sumut, kami aktif menggalang partisipasi masyarakat Jakarta untuk memberikan bantuan kepada para korban. Puluhan tenaga relawan bahu membahu bersama kami mengumpulkan bantuan, membantu proses evakuasi anak-anak korban bencana, termasuk menjadi jembatan untuk aliran informasi dari daerah bencana ke lembaga-lembaga yang akan menyalurkan bantuan. Menjelang proses rekonstruksi Aceh, serangkaian konsultasi publik di 10 kabupaten kami lakukan, sambil terus mendorong lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengawasi proses pelaksanaan rekonstruksi oleh pemerintah.

Kami sadar betul, pembangunan demokrasi membutuhkan upaya sistematis dari berbagai tingkatan untuk merajut jalinan kerjasama dan menghimpun berbagai sumberdaya yang tersedia. Atas pertimbangan itulah kami terus menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga di 15 kabupaten yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal. Kami pun mengkampanyekan nilai-nilai yang lebih mendalam dari sebuah kultur demokratis, seperti toleransi dan penghargaan pada cara pandang yang berlawanan. Mewujudkan demokrasi memang sebuah proses panjang yang membutuhkan waktu, dan upaya ke arah sana harus sudah dimulai sejak sekarang.

Lutfi J. Kurniawan

Malang Corruption Watch

- Peran Yappika dinilai oleh MCW cukup significant, khususnya dalam rangka membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam mendorong agenda-agenda kerjanya sekaligus memberi inspirasi bagi penguatan jaringan masyarakat sipil di daerah untuk pembangunan demokrasi lokal.
- Dalam membangun kemitraannya, Yappika dinilai sangat unik, pengalaman selama 2 tahun ini sisi keterbukaan dan kebersamaan dalam bermitra menjadi ciri tersendiri. Walau memiliki kewenangan untuk mengitrodusir mitra, Yappika kerap mampu meletakan posisinya sejajar dengan mitranya dalam mengusung program. Demikian pula dengan akuntabilitas dari sisi keuangan, Yappika sangat transparan bahkan nyaris tidak ada sama sekali yang ditutupi.

Gerakan Publik Untuk Perubahan

Merajut Hubungan “Konstituensi” DPD dan Rakyat

Semangat penerapan system bi-cameral dengan lahirnya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ternyata tidak mampu mengimbangi dominasi DPR di legislative. Lemahnya wewenang DPD menyebabkan semakin menurunnya antusiasme publik terhadap institusi baru tersebut. Dinamika politik di DPR yang seringkali diwarnai pertarungan antar fraksi, lebih mudah ditangkap oleh publik daripada dinamika di DPD yang masih dalam tahap penataan internal kelembagaan. Menurunnya harapan terhadap peran DPD juga terasa di daerah-daerah. Diskusi hangat mengenai DPD menjelang Pemilu kini menguap begitu saja. Selain disebabkan oleh belum adanya manfaat yang cukup signifikan dirasakan masyarakat di daerah-daerah atas keberadaan DPD sendiri, kondisi ini juga disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara DPD dengan masyarakat pemilihnya. Hingga saat ini belum ada pertemuan-pertemuan konstituensi yang dibangun oleh DPD di daerah untuk mempertemukan kebutuhan konstituen (masyarakat) dan peran yang bisa dimainkan oleh DPD di tingkat pusat.

Mengingat pentingnya peran DPD dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang menjadi konstituennya, Yappika menginisiasi pertemuan tatap muka antara DPD dengan berbagai elemen di tiga daerah yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Esensi dari kegiatan ini adalah mendorong rakyat agar proaktif memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia untuk mewujudkan aspirasinya melalui keberadaan DPD sekaligus mendorong DPD agar memfungsikan perannya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang dimandatkan kepadanya.

Dari ketiga pertemuan tersebut ditemukan kesamaan cara pandang masyarakat terhadap DPD, yaitu: **Pertama**; ada tuntutan agar DPD dapat meningkatkan peran di tengah keterbatasan wewenangnya dalam UUD dan UU Susduk, lebih kreatif, dinamis dan luwes dalam memperjuangkan tuntutan dari masyarakat daerah. Misalnya mempengaruhi amandemen UUD dan revisi UU Susduk mengenai perluasan wewenang DPD, melakukan lobby kepada para pembuat kebijakan yang mempunyai kekuatan eksekusi seperti DPR RI, pemerintah dan beberapa pihak lain yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan. **Kedua**; ada tuntutan agar DPD membangun hubungan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat di daerah sehingga masyarakat mengetahui agenda yang dibahas DPD di Jakarta serta sejauhmana pengaruhnya terhadap daerah. Di sisi lain DPD mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Guna memenuhi tuntutan tersebut, dibutuhkan sebuah kantor sekretariat di daerah yang berfungsi sebagai rumah aspirasi (*clearing house*) dan sebuah tim kerja yang mengolah dan menyampaikan aspirasi serta informasi dari dan kepada masyarakat. Keberadaan rumah aspirasi dan tim ini dipandang

penting agar bisa menampung aspirasi masyarakat, sekaligus secara proaktif ke masyarakat di tingkat basis untuk mencari dan verifikasi data. **Ketiga**; setiap perkembangan yang dilakukan DPD harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan parameter penilaian atas kinerja DPD. Langkah yang diinisiasi oleh Yappika ini diharapkan dapat menginspirasi dan dilakukan pula oleh kelompok-kelompok lain guna meningkatkan peran dan fungsi DPD untuk mewujudkan aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Terus Memperjuangkan “Partisipasi Masyarakat”

Advokasi yang dilakukan Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) yang bersekretariat di Yappika telah memperoleh hasil berupa dijaminnya hak masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi di dalam proses penyusunan undang-undang. Jaminan ini tercantum dalam UU no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disahkan oleh DPR. Walaupun mekanisme penggunaan atas hak partisipasi rakyat ini belum diatur, wacana terus digulirkan oleh KKP untuk mendorong kesadaran akan hak dan partisipasi aktif masyarakat yang lebih luas.

Proses advokasi pun dilanjutkan kepada Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat karena perubahan di tingkat undang-undang harus disertai dengan perubahan di tingkat kebijakan internal pembentuk undang-undang (DPR/D). Aspek legal yang menguatkan kegiatan upaya advokasi ini adalah UU memandatkan pengaturan hak partisipasi dilakukan di dalam Tata Tertib DPR dan DPRD.

Mengapa advokasi “partisipasi masyarakat” perlu dilanjutkan? Meskipun telah ada jaminan partisipasi masyarakat di dalam UU, namun ruang pelibatan masyarakat masih minim. Keberhasilan advokasi yang diperoleh di tingkat teks masih prosedural. Dalam hal ini KKP memandang ada enam prinsip utama yang memungkinkan adanya ruang untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- Adanya kewajiban publikasi yang efektif. Perlu dilihat dari segi jangkauan media, waktu yang memadai bagi *stakeholders* mempersiapkan diri, dan bahasa yang mudah dimengerti kelompok masyarakat yang potensial terkena dampak (*potentially affected*).
- Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang baik, bebas dan mudah diakses.
- Adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses sejak perencanaan.



- Dokumen dasar wajib ada dan bebas diakses.
- Adanya hak banding bagi publik baik pada proses maupun materi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat yang telah ditetapkan.
- Adanya sanksi yang wajar dan memadai bagi pembentuk undang-undang yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi.

Langkah advokasi yang dilakukan Koalisi adalah mendorong 6 prinsip tersebut dalam dua arena: negara dan rakyat. Pada arena negara koalisi melakukan pendekatan kepada pengambil kebijakan baik legislatif maupun eksekutif. Koalisi memelihara relasi dengan anggota DPR yang progresif memperjuangkan hak partisipasi masyarakat dari berbagai fraksi. Selain itu koalisi melakukan komunikasi intensif dengan tim asistensi Badan Legislatif DPR RI. Hasil dari pendekatan ini adalah termuatnya 3 pasal di dalam Tata Tertib DPR RI mengenai partisipasi masyarakat yaitu pasal 139 - 141.

Pada arena rakyat, koalisi mendorong perluasan gerakan publik yang lebih luas. Bentuk advokasi yang dilakukan dengan cara membuat seminar, diskusi-diskusi terbatas, lobby, hearing dan aksi. Daerah-daerah yang melakukan advokasi Tata Tertib DPRD antara lain Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Perjuangan merebut hak partisipasi rakyat dalam membentuk dan mewarnai wajah negeri ini harus dilanjutkan. Rakyat berhak terlibat, karena dalam alam demokrasi dialah pemberi mandat sekaligus pengawas atas perjalanan para pemimpin dan wakil rakyat negeri ini.

Arswendo Atmowiloto

(Eksekutif Atmochademas Production & Budayawan)

Sebuah kekerabatan atau kelompok kerja lebih mudah dimengerti pola kerjanya, bila menemukan sasaran yang jelas. Misalnya mengumpulkan dana untuk korban tsunami, atau memerangi AIDS, atau memberantas buta huruf, atau penyuluhan bagaimana memanfaatkan air susu ibu.

Yappika, sejauh saya tahu, memilih sasaran yang berbeda, yang mendasar, kadang juga abstrak. Sosialisasi mengenai demokrasi, atau juga mengenai pendekatan pluralisme, misalnya, bukan hanya karya yang menuntut ketekunan, kesabaran, mungkin sekali justru berawal dari harapan. Karena keberhasilan, atau kegagalannya, tak bisa diperhitungan seketika, seperti penilaian hasil sharing atau rating acara televisi pada minggu berikutnya.

Upaya-upaya kemanusiaan yang dilakukan Yappika adalah pendekatan yang tak ada selesainya, tak harus diukur dengan suatu satuan waktu. Sebab nilai-nilai kemanusiaan yang disegarkan adalah nilai-nilai yang selalu berubah tata kramanya, tata nilainya. Juga pendekatan yang harus dilakukan. Ini yang membesarkan hati bahwa kita layak mempunyai harapan, karena selalu ada yang bermurah hati.

Geliat Gerakan Warga di DAS Lamasi Luwu Sulawesi Selatan

Sungai adalah sumber penghidupan. Namun sungai juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Begitupun dengan Sungai Lamasi di Kabupaten Luwu. Kelokannya yang indah ternyata berubah setiap tahun. Dan itu tidak saja mengisyaratkan terjadinya degradasi lingkungan pada bagian hulunya namun juga kerap memicu konflik antar warga sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Karena itu, upaya menata kawasan DAS Lamasi tidak cukup hanya menangani alam dan lingkungan fisik semata dengan mengabaikan manusia yang bergantung pada DAS Lamasi sebagai ruang hidup dan kehidupannya. Perhatian terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan relasi masyarakat dengan alam adalah penting. Warga kawasan hulu mengandalkan hidup dari sumberdaya sekitar hutan, warga kawasan tengah bergantung pada stabilitas debit air sungai Lamasi untuk mengairi sawahnya, sementara warga kawasan pesisir bergantung pada hasil tangkapan ikan di muara sungai dan laut sekitarnya. Pendekatan yang tidak hati-hati tidak saja terancam gagal bahkan dapat memicu konflik.

Namun saat ini, di sepanjang bentang kawasan daerah aliran Sungai Lamasi telah terbentuk sebuah forum di mana wakil masyarakat dari 21 desa hulu, tengah dan hilir duduk di dalamnya. Bersama dengan YBS Palopo, Forum ini terus bekerja memperkuat bangunan gerakan dan merumuskan strategi kerja yang efektif guna mewujudkan penataan kawasan DAS yang menguntungkan warga. FORUM DAS WALMAS (Walenrang Lamasi), demikian nama yang mereka pilih, telah mematangkan hasil-hasil pertemuan awal mereka dalam sebuah **lokakarya yang dilakukan secara swadaya**. Saat ini YBS Palopo lebih banyak mengambil peran memfasilitasi proses sehingga aspirasi dan gagasan yang berkembang dalam Forum dapat lebih operasional. Berkerjasama dengan Yappika, saat ini YBS Palopo dan FORUM DAS WALMAS tengah mendorong adanya kebijakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di kawasan DAS Lamasi. Dukungan atas inisiatif ini telah muncul dari Dinas Kehutanan dan DPRD daerah pemilihan Lamasi dan Walenrang. Draft kebijakan bahkan telah ditunggu untuk dapat segera mereka ajukan dalam agenda pembahasan dewan. Ini adalah sebuah capaian yang menggembirakan serta menunjukkan bahwa inisiatif dan gerakan rakyat yang kuat akan mampu mempengaruhi kebijakan yang dirumuskan pemerintah. Kebijakan yang didorong untuk berpihak secara adil kepada rakyat.



Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Teluk Palu yang Adil dan Demokratis: Antara Negosiasi Dan Kolaborasi

Benturan kepentingan dalam memanfaatkan teluk Palu di Sulawesi Tengah, antara pemilik modal dengan nelayan tradisional telah menyebabkan ketegangan yang panjang di kawasan itu, terutama akibat munculnya berbagai aktivitas dan kebijakan yang merugikan nelayan. Tidak cukup limbah rumah tangga, teluk Palu juga mulai dipenuhi oleh buangan limbah industri serta penambangan pasir dan batu yang berakibat pada menurunnya produksi ikan dan tangkapan nelayan. Derita nelayan agaknya tidak berhenti sampai disitu. Penguasaan secara meluas kawasan pantai oleh pemodal menyebabkan wilayah tambak dan akses ke laut terus berkurang. Menghadapi hal ini, para nelayan tradisional yang tergabung dalam Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTN) dan kelompok muda pemerhati lingkungan teluk Palu, dengan pendampingan dari Yayasan Pendidikan Rakyat Palu (YPR Palu), berupaya memperjuangkan haknya atas sumber daya di teluk Palu kepada pemerintah. Jika sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan konfrontatif, saat ini SNTN berusaha memperkaya strategi perjuangannya. Berbagai aksi damai, dialog dan usulan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan dan memberikan ruang bagi nelayan untuk tetap beraktivitas di teluk Palu terus dilakukan.

Saat ini, gerakan rakyat terorganisir tersebut bekerjasama dengan Yappika, tengah mendorong diterbitkannya kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan kawasan teluk Palu yang adil, berkelanjutan dan menjamin adanya akses masyarakat tradisional, baik nelayan maupun pemerhati lingkungan, terhadap sumber daya di kawasan teluk Palu. Program kerja atas inisiatif dan koordinasi YPR Palu ini, mendapatkan dukungan yang cukup besar dari para stakeholders kunci. Tak kurang dari Ketua DPRD Kota, Ketua Bappeda, Kepala Dinas PU, Asisten I Walikota Palu, memberi dukungan yang cukup kuat atas upaya yang tengah dilakukan YPR Palu dan basis dampingannya. Bahkan, Ketua DPRD Kota meminta agar konsep penataan yang dimaksudkan YPR Palu segera disampaikan kepadanya untuk kemudian dibahas dan sebisa mungkin akan dilegalisasi sebagai inisiatif Dewan. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras, koordinasi yang kuat di dalam kelompok-kelompok basis dan inisiatif-inisiatif aktif dari basis dengan fasilitasi YPR Palu. Partisipasi aktif dan kuatnya gerakan mereka telah menarik perhatian dan mendorong pemerintah setempat untuk mendengar dan memikirkan aspirasi rakyat. Ini adalah salah satu bukti, bahwa partisipasi aktif rakyat yang terorganisir akan mampu membuat perubahan yang berpihak kepada rakyat.

Semangat Relawan & Geliat Nurani

Kesukarelawanan Tanggap Bencana Gempa dan Tsunami Aceh

Bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada pagi hari, 26 Desember 2004 yang memakan korban ratusan ribu jiwa, telah menggerakkan masyarakat Indonesia bahkan dunia internasional untuk memberikan dukungan nyata kepada rakyat Aceh. Yappika yang telah 10 tahun bekerja di Aceh, turut serta memberikan dukungan dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Mulai tanggal 31 Desember 2004 – 28 Februari 2005, Yappika mengelola informasi yang berkaitan dengan: (a) kondisi pengungsi di titik-titik pengungsian; (b) kondisi/situasi pos-pos transit (pos transit = pos yang tidak secara langsung menangani pengungsi korban gempa-tsunami; lebih berfungsi sebagai tempat pengumpulan, seleksi, dan pemberangkatan logistik/peralatan/relawan ke berbagai titik pengungsian) di Jawa, Bali, Medan dan Aceh; serta (c) moda transportasi yang potensial untuk dimanfaatkan secara gratis atau membayar dengan harga diskon dan nomor-nomor kontakannya, baik melalui udara, air, maupun darat, dalam rangka mengirim bantuan kemanusiaan ke Aceh dan Sumatera Utara.

Tujuan pengelolaan informasi ini adalah untuk membangun sinergi gerakan dan mengefektifkan pemberian bantuan terhadap korban bencana gempa-tsunami di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Seluruh informasi yang terkumpul disebarluaskan melalui email dan mailing list setiap hari pada bulan Januari 2005 dan seminggu 3 kali pada bulan Februari 2005. Selain mengelola pusat informasi, Yappika menjalankan fungsi penghubung antara kebutuhan lapangan pengungsi dengan sumber-sumber logistic di pos-pos transit.

Dalam menjalankan fungsi mengelola pusat informasi, Yappika dibantu oleh 16 orang relawan yang setiap hari mengumpulkan data lapangan melalui telepon serta melakukan entry data. Sebanyak 258 orang informan pernah tercatat sebagai pen-supply informasi lapangan secara sukarela dan tersebar di 16 kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam. Para informan ini terdiri dari penduduk setempat, sukarelawan, dokter, wartawan, mahasiswa, dll. Yappika berhasil memperoleh kontak mereka berdasarkan informasi dari berbagai pihak dan para sukarelawan Pemilu 2004 yang berkerja bersama Yappika. Kesukarelaan mereka dalam memberikan informasi secara berkala serta kesabaran dan ketekunan para relawan di pusat informasi adalah bukti nyata akan kekuatan partisipasi masyarakat sipil dalam memberikan dukungan untuk kerja-kerja kemanusiaan. Atas partisipasi aktif mereka, Yappika mampu mengeluarkan informasi-informasi yang cepat, lengkap, akurat dan menjadi rujukan beberapa pihak, guna turut mempercepat pengiriman bantuan kepada rakyat Aceh. Secara keseluruhan, Aceh dapat berdiri kembali dari tragedi bencana alam atas dukungan aktif masyarakat Indonesia dan internasional.

Menggulirkan Isu Pluralisme dalam Buku Agenda 2005

Di penghujung tahun 2004, Yappika kembali menerbitkan buku agenda harian untuk tahun 2005. Buku ini dibuat sebagai salah satu media untuk menggulirkan isu pluralisme atau penghargaan terhadap keberagaman yang telah dilakukan sejak tahun 2002. Buku bertajuk 'Keberagaman adalah Cetak Biru Dunia' ini menampilkan beragam ruang public dalam keseharian kehidupan masyarakat. Sebuah ruang yang telah menjadi tempat interaksi antar beragam identitas sosial secara alamiah dan damai baik suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahkan aneka latar belakang tingkat ekonomi. Melalui buku agenda ini, kami ingin mengusik perhatian public yang membaca dan menggunakannya, tentang bagaimana memaknai keberagaman bangsa, guna mendorong terciptanya atmosfer kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghargai perbedaan.



Rakk-Fest 2004 : Bangun Solidaritas dalam Keberagaman Kita



Tahun 2004 adalah kali ketiga penyelenggaraan event tahunan Festival Rayakan Keberagaman Kita (Rakk-fest). Festival yang ditujukan untuk menggulirkan isu pluralisme atau penghargaan terhadap keberagaman bangsa baik suku, agama, ras, antar golongan dan gender ini semakin banyak memperoleh dukungan. Sebanyak 3 lembaga yaitu Rempug Bersama, Yayasan Anak Bangsa Indonesia (YABI), Gerbong Rakyat (GeRaK) menjadi rekan Yappika untuk mengorganisir festival. Tak kurang dari 16 lembaga lainnya turut mendukung Rakk-fest seperti Kapal Perempuan, BEM UIN, Lembaga Penelitian Univ.

Atmajaya, Pondok Cipta, C&B Entertainment, Radio 68H, dll. Di bawah tema "Bangun Solidaritas Dalam Keberagaman Kita", Rakk-fest 2004 berhasil mengkreasi 16 macam kegiatan sepanjang bulan Agustus - September 2004 di antaranya, lomba seni kolaborasi, lomba melukis mural, karnaval, kenduri budaya, lomba acapela, pertunjukan seni, roadshow dongeng, dolanan anak Indonesia, panggung diskusi tentang keberagaman, dll. Beragam kegiatan yang dihadirkan merupakan strategi untuk melibatkan public secara

aktif dalam perguliran isu ini. Karena tanpa partisipasi aktif mereka dari segala lapisan social dan tingkat usia, atmosfer penghargaan terhadap keberagaman tidak akan bermakna.

Hal menarik dalam pelaksanaan Rakk-fest tahun ini adalah keterlibatan 175 orang relawan yang tersebar dalam berbagai kegiatan. Walaupun ada kesulitan mengelola mereka secara optimal, kehadiran dan partisipasi aktif mereka adalah fakta adanya sumber daya besar yang dapat digerakkan sebagai agen perubahan social. Pelajaran berharga lainnya adalah keterlibatan public figure seperti budayawan dan artis ternyata masih menjadi daya tarik public dalam sebuah proses perguliran isu. Keterlibatan si Burung Merak WS Rendra, Arswendo Atmowiloto dan Oppie Andaresta telah memberikan warna dan dukungan tersendiri dalam perjalanan Rakk-fest.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengemas isu pluralisme yang abstrak ini menjadi bahasa sederhana namun mampu mengusik perhatian dan nurani public. Harapannya, semakin komunikatif kemasan sebuah isu maka publik pun dapat diraih dan bergerak memberikan dukungan.

Relawan, Sebuah Energi Lepas yang Perlu Ditangkap

Selama dua tahun terakhir ini, Yappika secara intensif mengelola relawan dengan melibatkan mereka di berbagai aktivitas. Aksi mereka semakin intensif bersama Yappika seiring dengan kedekatan dan pemahamannya akan arti kerelawanan dalam aktivitas sosial. Kualitas keterlibatan, komitmen, keinginan untuk mengembangkan diri, tingkat kemandirian dalam bekerja serta hasil kerja pun meningkat. Tak jarang mereka pulang hingga larut malam untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebuah kegiatan *volunteer gathering* dilakukan oleh Yappika pada bulan September 2004, sebagai ajang refleksi keterlibatan Yappika – relawan, team building dan menyusun rencana aksi. Para relawan juga menarik kawan-kawan di sekitarnya untuk terlibat di Yappika. Sebanyak 175 orang pernah tercatat sebagai relawan di Yappika, 28 orang di antaranya sangat aktif dalam berbagai kegiatan bahkan hingga kegiatan rutin kantor. Bagi Yappika, dukungan relawan penting artinya bagi perguliran isu yang diusung oleh Ornop. Mereka adalah media kampanye yang efektif dan merupakan energi lepas yang perlu ditangkap, sebagai wujud dukungan publik untuk memperluas gerakan sosial. Publik yang aktif adalah kunci perubahan sosial di alam demokrasi.





Peluncuran Buku Seri Konflik untuk Kelas Menengah

Tanggal 15 Juni 2004, Yappika mengadakan peluncuran tiga judul buku seri konflik, yaitu Konflik Suara dari Poso, Peta Konflik Jakarta dan Sang Martir Tengku Bantaqiah di Tee Box Café Jakarta. Peluncuran buku diisi dengan dialog interaktif bertajuk "Konflik

Selalu Menghasilkan Korban", menghadirkan 3 orang pembicara yaitu Thamrin Amal Tamagola, Agus Budi Purnomo dan Ruth Indiah Rahayu. Jalannya diskusi dipandu oleh dua orang moderator yaitu Ira Koesno dan Lili Hasanuddin dari Yappika.

Beberapa isu muncul dalam proses diskusi yang dihadiri oleh undangan khusus dari golongan kelas menengah Jakarta yang pernah menjadi responden Knowledge Attitude Survey (KAP) Yappika tahun 2003. beberapa di antaranya adalah tentang perempuan yang selalu menjadi korban dan menempati posisi paling dirugikan dalam setiap konflik kekerasan, pencegahan konflik melalui pendidikan di tingkat keluarga dan beragam kondisi social Indonesia yang rawan konflik. Pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai bagaimana kelas menengah dapat berpartisipasi dalam upaya-upaya pencegahan konflik dan membangun perdamaian, sengaja dilemparkan kepada para peserta. Hal ini dilakukan mengingat kelas menengah mempunyai akses sumber daya ekonomi, pendidikan, informasi dan politik yang lebih besar dibandingkan kelompok-kelompok marginal. Partisipasi aktif mereka dalam pencegahan konflik dan upaya membangun perdamaian di Indonesia yang sangat plural dan ketimpangan ekonomi yang tinggi akan memberikan hasil yang significant. Perjalanan masih panjang untuk dapat menggugah dan mendorong peran aktif mereka. Namun kita perlu terus mencobanya karena buah dari aktivitas pendidikan publik memang tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat.

Prof. DR. Alois Agus Nugroho

Direktur Pasca Sarjana Univ. Atmajaya Jakarta

- Berkenalan dengan Yappika pada awal 2004 merupakan rahmat bagi saya. Ibarat seorang gelandangan yang lebih suka menyendiri, saya menemukan kehangatan rumah singgah yang senantiasa terbuka pintunya untuk kadang-kadang didatangi. Dari Yappika saya bisa belajar berpartisipasi dalam memasyarakatkan kesadaran akan keberagaman dan berperilaku sesuai dengannya. Usaha ini akan memberi dasar empiris yang kokoh bagi refleksi-refleksi etika sosial.
- Lebih khusus lagi, sejauh penyelenggaraan Festival Keberagaman 2004 dapat kita jadikan pelajaran, mungkin dapat disimpulkan bahwa kita perlu lebih memahirkan diri dalam "social marketing" (pemasaran sosial). Dengan itu, ide-ide dan nilai-nilai perlu kita kemas menjadi program-program yang menarik hati bagi segmen masyarakat yang menjadi sasaran pemasaran sosial itu. "Events" yang dihadiri oleh 50 orang tentu akan lebih memuaskan daripada yang dihadiri oleh 20 orang, bila para hadirin berasal dari segmen masyarakat yang sama dan biaya yang dikeluarkan juga sama.

Menembus Ruang Menggapai Harapan



Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pemilu di Nanggroe Aceh Darussalam

Kita bisa mempunyai sistem Pemilu yang baik untuk menjalankan Pemilu yang lebih demokratis adil dan transparan. Namun semua sistem dan perangkat pendukung tersebut tidak akan ada artinya jika kita sebagai warga negara tidak memanfaatkannya secara maksimal. Pemilu yang

demokratis dan transparan tidak selalu menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang baik. Hanya kita yang bisa memberi warna, memastikan makna, sehingga sistem yang relatif lebih baik bisa betul-betul terlaksana serta menghasilkan sesuatu yang baik pula.

Berangkat dari hal tersebut, Yappika bersama Forum LSM Aceh dan lima lembaga anggota Forum LSM Aceh, turut serta berkiprah dalam Pemilu 2004, melakukan pendidikan pemilih sekaligus pemantauan Pemilu di Nanggroe Aceh Darussalam. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan pemilih-pemilih yang bijak karena cukup informasi untuk menetapkan pilihan sekaligus mendorong mereka untuk memantau proses Pemilu, memastikan bahwa Pemilu berlangsung aman, transparan, adil dan demokratis. Tema kami dalam Pemilu 2004 ini adalah “tentukan pilihan secara bijak dan berperilaku damai”.

Pilihan terhadap propinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada beberapa alasan; pertama, Pemilu dilaksanakan dalam kondisi rawan keamanan yang disertai status Darurat Militer (*martial law*). Kedua, sebagai dampak dari Darurat Militer, ruang politik masyarakat sipil menjadi semakin sempit dan dikhawatirkan hak-hak mereka sebagai warga negara tidak terekspresikan seperti di daerah-daerah Indonesia lainnya. Ketiga, momentum Pemilu kemungkinan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkonflik sebagai arena untuk menunjukkan eksistensi masing-masing. Ke empat, sistem Pemilu 2004 mengalami banyak perubahan dan perubahan-perubahan itu harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat Aceh agar mereka dapat menggunakan hak politiknya dengan benar.

Pendidikan pemilih dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media mulai media elektronik seperti radio dan TV, sampai pemutaran film keliling, penyebaran poster dan pertemuan tatap muka dengan kelompok-kelompok masyarakat di 5 kabupaten di Aceh. Kegiatan ini berhasil menjangkau kurang lebih 1.6 juta calon pemilih dari berbagai

kalangan di Aceh. Sementara itu pemantauan pemilu yang dilakukan mencakup pemantauan kuantitatif (*quick count dan exit poll*) serta kualitatif (*long-term monitoring*). Masyarakat setempat dan 402 orang relawan di 402 titik pemantaun yang tersebar di 21 Kabupaten di Aceh, turut terlibat dalam memantau proses penyelenggaraan Pemilu dan hasil penghitungan suara Pemilu. Dan karena jasa mereka, prediksi perolehan suara dan disitribusi kursi bagi masing-masing Parpol di DPR dan DPRD, prediksi perolehan suara anggota DPD berikut urutannya, dan prediksi perolehan suara bagi setiap calon Presiden dapat diinformasikan kepada publik, sebelum KPU mengumumkan hasil resmi. Sejumlah pelanggaran menjelang maupun pada saat pelaksanaan Pemilu pun berhasil diidentifikasi. Salah satu pelanggaran yang cukup signifikan ditemukan di sebuah TPS di Aceh Tenggara yang kertas suaranya sudah tercoblos sebelum pemungutan suara berlangsung dalam rangka menguntungkan Parpol tertentu. Temuan ini ditindaklanjuti oleh KPUD Propinsi dengan melakukan *cross-check* ke Aceh Tenggara.

Pohon Harapan dari Aceh, Bulukumba dan Tual untuk Presiden di Pemilu 2004

Pemilu 2004 adalah harapan bagi masyarakat Indonesia untuk ke luar dari keterpurukan identitas, kemiskinan, kekerasan dan ketidakadilan. Dengan system Pemilu baru melalui pemilihan presiden langsung, rakyat mempunyai kesempatan memilih pemimpin yang akan dipercaya untuk mengemban segudang amanatnya. Berkaitan dengan momentum ini, pada bulan Mei – Juni 2004, Yappika bekerjasama dengan Koalisi Media untuk Pemilu Bebas dan Adil, melakukan penggalan harapan rakyat kepada presiden terpilih di Aceh (bersama Forum LSM Aceh), Bulukumba (Sulawesi Selatan – bersama Yayasan Pendidikan Rakyat Bulukumba) dan Tual (Maluku – bersama Yayasan Hivlak). Kegiatan ini kami namakan pohon harapan, sebagai simbol akan upaya dan semangat rakyat untuk selalu tumbuh dalam memperjuangkan hak-haknya terhadap pemangku kekuasaan negara. Di atas kertas yang didesain seperti kartu pos berbentuk daun berwarna hijau dan coklat orange, masyarakat di 3 tempat tersebut menuliskan harapan dan tuntutan mereka kepada presiden terpilih.



Untuk daerah Aceh, proses penggalan harapan rakyat dilakukan di 5 kabupaten, yaitu Banda Aceh, Aceh Tenggara, Sabang, Singkil dan Simeulue. Khusus untuk Banda Aceh, beberapa spanduk dengan panjang total kurang lebih 150 meter diletakkan di tempat-tempat umum seperti pasar, pertokoan dan jalan-jalan besar untuk memberikan

kesempatan kepada masyarakat mengungkapkan harapannya. Total harapan rakyat yang terkumpul adalah 8103 buah dengan perincian 6.968 dari Aceh, 535 dari Bulukumba dan 600 dari Tual.

Hal menarik dari kumpulan harapan tersebut adalah masalah perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat menduduki peringkat pertama di Aceh, disusul dengan masalah penyelesaian konflik dan kekerasan serta pendidikan. Asumsi sebelumnya, masalah konflik dan kekerasan akan mendominasi harapan rakyat Aceh mengingat tingginya pemberitaan tentang kekerasan, namun ternyata hasilnya lain. Hal ini mungkin disebabkan daerah kegiatan termasuk dalam kawasan 'putih' (jarang terjadi kontak senjata atau kekerasan antara TNI – GAM) sehingga masalah kesejahteraan dan ekonomi menjadi masalah utama dalam keseharian masyarakat. Sementara itu harapan dari Bulukumba didominasi oleh masalah konflik sumber daya alam antara masyarakat adat Kajang dengan PT. London Sumatra.

Seluruh harapan rakyat yang terkumpul dari Aceh dan Bulukumba, bersama dengan harapan rakyat dari 16 kota lainnya yang dikumpulkan oleh Koalisi Media telah diserahkan kepada presiden terpilih melalui staf sekretaris negara, pada saat dilangsungkannya *open house* perayaan idul fitri di istana negara, pada tanggal 18 Nopember 2004. Kita menunggu, apakah ribuan harapan rakyat tersebut memperoleh perhatian dari presiden.

Upaya Penguatan Masyarakat Sipil di 8 Kabupaten melalui Pelaksanaan Indeks Masyarakat Sipil

Dalam rangka penguatan masyarakat sipil di tingkat Kabupaten, Yappika bekerjasama dengan Access merancang program Pemanfaatan Index Masyarakat Sipil (IMS) untuk Meningkatkan Peran Masyarakat Sipil Dalam Pengembangan Kabupaten. Kegiatan dilakukan dalam bentuk riset pemetaan masyarakat sipil di 8 kabupaten, untuk mengidentifikasi organisasi atau orang yang dipercaya oleh masyarakat marjinal serta tingkat partisipasi yang telah dilakukan. Kegiatan dilanjutkan dengan rangkaian lokakarya untuk mengukur tingkat esehatan masyarakat sipil di 8 kabupaten tersebut, yaitu Jeneponto, Bantaeng, Muna, Buton, Sumba Barat, Sumba Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Lokakarya IMS ini dihadiri oleh orang-orang yang dipercaya berdasarkan hasil riset serta stakeholder lainnya seperti pers, pemerintah, DPRD, dari kalangan swasta dan mahasiswa.



Lokakarya IMS tersebut telah berhasil menjadi media refleksi tentang kondisi masyarakat sipil dan berhasil membentuk kelompok kerja (working group) di setiap kabupaten tempat pelaksanaan kegiatan. Anggota kelompok kerja ditunjuk oleh para peserta lokakarya untuk mewakili sektor-sektor masyarakat sipil yang hadir. Kelompok kerja ini bertugas merancang strategi dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka penguatan masyarakat sipil sehingga agenda-agenda aksi yang telah disepakati dalam lokakarya IMS dapat terlaksana optimal. Dalam perkembangannya, kelompok kerja di beberapa kabupaten telah melakukan aktivitas merespon kondisi sosial masyarakat yang berkembang di kabupaten masing-masing. Di Buton, kelompok kerja Buton (Buton Working Group) telah berhasil mengangkat persoalan-persoalan kabupaten seperti air, pelayanan RSUD Baubau, kerusakan habitat laut dan indikasi KKN dalam pencalonan Pegawai Negeri Sipil dalam serangkaian talkshow di radio bertajuk Kedai Mangga Dua. Kelompok kerja di Muna telah mendesak pemerintah/Bappeda membuka proses perencanaan tahunan secara lebih luas. Selain itu mereka juga melakukan aksi bersama solidaritas untuk Aceh.

Bagi Yappika, kegiatan Indeks Masyarakat Sipil tahun ini merupakan kali ke dua. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tahun 2002 di 6 regio yaitu Regio Kalimantan, Regio Sumatera, Regio Jabotabek, Regio Jawa-Bali, Regio Nusa Tenggara, dan Regio Papua.

Eep Saefulloh Fatah,

Pengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia,
Wakil Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Jakarta

Perjumpaan saya dengan Yappika terjadi di tengah hiruk pikuk persiapan Pemilu 1999. Ketika itu, Yappika mengorganisir pemantauan pemilu berbasis konsorsium sejumlah organisasi non-pemerintah. Setelahnya, saya tahu, Yappika menjadi salah satu anasir civil society yang bergairah mengorganisir proyek pemberdayaan masyarakat dan mempromosikan demokrasi. Saya berkali-kali berkesempatan terlibat di dalamnya.

Di Indonesia, sebagaimana dalam sebagian kasus demokratisasi gelombang ketiga lainnya, peranan elemen-elemen civil society dalam periode awal transisi memang amat penting dan krusial. Persoalannya, ketika proses demokratisasi berlanjut dan arena permainan semakin termapankan menjadi milik kalangan elite -- melalui partai, parlemen dan pemerintahan --, daya tahan civil society di luar lembaga-lembaga politik formal semakin menurun. Begitu pulalah kurang lebih yang terjadi di Indonesia.

Dalam konteks itu, Yappika adalah satu dari sedikit anasir civil society yang berhasil menjaga staminanya dan tak terlihat kedodoran. Setidaknya begitulah kesan saya. Karena itu, apresiasi layak diberikan untuk Yappika sambil menegaskan betapa peranannya (bersama-sama organisasi non pemerintah lainnya yang pandai menjaga staminanya) akan ikut menentukan masa depan konsolidasi demokrasi Indonesia.

Berbagi Membangun Kekuatan Bersama

Presentasi Karya Ilmiah Kajian Kebijakan di Komisi Hukum Nasional Indonesia

Pada bulan Oktober 2004, Komisi Hukum Nasional Indonesia mengundang Yappika untuk mengikuti seleksi karya ilmiah mengenai kajian kebijakan. Komisi Hukum Nasional adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan mewujudkan sistem hukum nasional untuk menegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, berdasarkan keadilan dan kebenaran, dengan melakukan pengkajian masalah-masalah hukum serta penyusunan rencana pembaruan di bidang hukum secara obyektif dengan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat. Yappika membuat karya ilmiah berjudul “Kebijakan Wilayah di 15 Kabupaten/Kota Pasca Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah” berdasarkan kompilasi hasil studi kebijakan di 6 wilayah kerja Yappika, yaitu Bojonegoro, Bulukumba, Donggala, Jayapura, Jember, Kupang, Lembata, Luwu, Makasar, Malang, Maluku, Palu, Sikka, Sorong dan Tolitoli. Bersama 20 karya ilmiah lembaga lain, karya ilmiah Yappika berhasil lolos seleksi dari 61 karya yang masuk. Karya ilmiah tersebut kemudian dipresentasikan dalam sebuah Seminar Pengkajian Hukum Nasional bertema “Membangun Paradigma baru Pembangunan Hukum Nasional” di Hotel Sahid Jakarta pada tanggal 6 – 7 Desember 2004, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional. Kesimpulan dan rekomendasi karya ilmiah ini kemudian dipublikasikan melalui website Komisi Hukum Nasional (www.komisihukum.go.id) sebagai rekomendasi bidang pembangunan hukum dalam konteks desentralisasi bagi pembangunan program hukum nasional untuk berbagai pihak yang berkepentingan.

Komparasi Studi Penyusunan Anggaran dan Perencanaan Pembangunan

Studi perbandingan (komparasi) mengenai model penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan yang partisipatif dilakukan oleh Yappika terhadap dua contoh kasus, yaitu Kerala (India) dan Porto Alegre (Brasil). Studi di antaranya mencakup kondisi atau konteks politik setempat, proses partisipatif, struktur dan mekanisme, dampak serta pembelajaran berharga dari kelemahan kedua model partisipatif tersebut. Pilihan kepada Kerala dan Porto Alegre sebagai obyek studi karena kedua kota tersebut dianggap sebagai model partisipatif yang cukup berhasil.

Hasil studi ini ditujukan untuk berbagi pengalaman dan memberikan inspirasi -dari beberapa pengalaman keberhasilan (*best practices*) di kedua kota tersebut- kepada para mitra Yappika yang tergabung dalam program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD). Hal ini penting dilakukan mengingat banyak mitra Yappika yang bekerja untuk mendorong isu anggaran dan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Studi yang dilakukan Yappika dengan bantuan seorang peneliti lepas ini dilaksanakan pada bulan April – Juni 2004, dan telah dipresentasikan dalam pertemuan mitra TPLD pada tanggal 21 – 25 Juni 2004 di Hotel Pitagiri Jakarta. Tanggapan dan masukan muncul dari para peserta, di antaranya merefleksikan pengalaman negara lain tersebut ke situasi Indonesia, perlunya sistem dan mekanisme yang baik untuk membentuk partisipasi publik, pentingnya dorongan kepada pemerintah yang berkuasa untuk melibatkan masyarakat, dan perlunya pelaksanaan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung dalam penyelenggaraan negara.

Penerbitan Buku Anti Korupsi dan Malapetaka Sampah

Tahun 2004 ini Yappika bekerjasama dengan Malang Corruption Watch (MCW) menerbitkan buku seri pendidikan anti korupsi berjudul “Mengerti dan Melawan Korupsi”. Buku ini menuturkan seluk beluk korupsi, kendala pemberantasan korupsi dan bagaimana masyarakat sipil membuat gerakan melawan korupsi. Buku seri pendidikan Anti Korupsi ini selain didistribusikan kepada kelompok dampingan MCW dan masyarakat luas secara gratis, juga dijual di berbagai kedai toko buku untuk dijual.

Selain itu Yappika juga berkontribusi dalam penerbitan Buku “Malapetaka Sampah: Kasus TPA Bantar Gebang, Kasus TPA/IPLT Sumur Batu, Kasus TPST Bojong” kepada Urban Poor PIDUS (Pusat Inovasi Daur Ulang Sampah). Buku ini bertujuan untuk melakukan advokasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik untuk mendorong segera disahkannya UU Persampahan, melakukan penyadaran pada berbagai pihak (stakeholder) mengenai dampak pengelolaan sampah yang buruk serta pengorganisasian kelompok-kelompok tingkat komunitas di sekitar TPA sampah. Buku ini diharapkan menjadi inspirasi bagi gerakan masyarakat sipil di daerah lain sekaligus turut menyumbang terhadap penguatan proses advokasi terkait dengan kasus TPA sampah.



Refleksi dan Berbagi Informasi dalam Pertemuan Mitra Yappika

Pertemuan mitra merupakan salah satu wahana bagi Yappika untuk meningkatkan pengetahuan mitra dalam rangka advokasi kebijakan, memperoleh masukan-masukan berdasarkan situasi daerah terkini baik dari mitra maupun sekutu yang dilibatkannya. Pertemuan mitra telah dua kali diselenggarakan dalam periode ini.

Pertemuan mitra yang pertama (Juni 2004) dihadiri 34 orang (12 perempuan) staf lembaga mitra, mengetengahkan sebuah studi komparasi mengenai model penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan partisipatif dari negara lain (Kerala dan Porto Alegre).

Pertemuan mitra yang kedua (Februari 2005) mendiskusikan strategi advokasi yang efektif dengan bertumpu pada pengalaman mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal dan nasional, serta melakukan perencanaan kolektif kegiatan tahun anggaran 2005-2006. Pertemuan mitra kali ini juga sekaligus memberi kesempatan kepada lembaga mitra untuk membangun aliansi dengan sekutu utama di daerah kerja mereka masing-masing, dengan mengundang kehadiran para sekutu tersebut dalam pertemuan mitra. Salah satu hasil dari pertemuan mitra ini adalah adanya pembelajaran dan rekomendasi-rekomendasi terhadap isu-isu tata pemerintahan lokal yang demokratis di antaranya advokasi kebijakan, penguatan organisasi perempuan, penguatan kapasitas kelembagaan, dll. Pertemuan ini juga berhasil merumuskan inisiatif-inisiatif strategi perencanaan aksi baru secara partisipatoris.



Gallery aktivitas Yappika lainnya:

- Mengikuti simposium Asia Pacific Working Group di bidang Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh CCIC serta kunjungan ke beberapa organisasi yang bergerak di bidang multikulturalisme dan pengelolaan relawan di Ottawa Kanada, tanggal 1 - 10 Desember 2004.
- Kunjungan ke Jepang dalam acara sharing pengalaman membangun kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM, diselenggarakan oleh JICA pada tanggal 19 - 30 September 2004.
- Bekerjasama dengan lembaga lain menyelenggarakan peringatan Hari Anti Penyiksaan, tanggal 21 - 25 Juni 2004.

YAPPIKA ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2004 AND 2003

	<u>2 0 0 4</u>	<u>2 0 0 3</u>
	Rp	Rp
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
Excess of Revenues over Expenditures (Expenditures over Revenues)	166,203,586	918,723,070
Adjustments to Reconcile Excess of Revenues over Expenditures (Expenditures over Revenues) to Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities :		
Correction on Fund Balance	78,448,589	(23,779,273)
Reversed Journal Entries - Equipment Acquired through Grant Fund to Fixed Assets	-	163,452,080
D e p r e c i a t i o n	173,221,045	120,528,735
Cash Receipts from Sales of Fixed Asset	-	7,000,000
Decrease (Increase) in :		(62,500)
Accounts Receivable	64,719,700	(50,735,940)
Other Receivables	(91,131,906)	93,079,960
A d v a n c e s	(971,262,621)	1,487,992
Increase (Decrease) in :		
Other Payables	(5,247,976)	2,927,979
Due to Grantors	55,751,538	95,874,690
Taxes Payable	7,873,441	1,886,399
Net Cash Provided by Operating Activities	<u>(521,424,604)</u>	<u>1,330,383,192</u>
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES		
Acquisition of Fixed Assets	<u>(2,000,000)</u>	<u>(172,597,580)</u>
NET INCREASE IN CASH	(523,424,604)	1,157,785,612
CASH ON HAND AND IN BANKS, BEGINNING	<u>2,606,411,490</u>	<u>1,448,625,878</u>
CASH ON HAND AND IN BANKS, ENDING	<u><u>2,082,986,886</u></u>	<u><u>2,606,411,490</u></u>

See accompanying Notes to Financial Statements
which are an integral part of these Statements

YAPPIKA ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONS
AS OF DECEMBER 31, 2004 AND 2003

A S S E T S		LIABILITIES AND NET ASSETS			
	Notes	2 0 0 4	2 0 0 3	Notes	2 0 0 3
		Rp	Rp		Rp
CURRENT ASSETS				CURRENT LIABILITIES	
Cash on Hand and in Banks	4	2,082,986,886	2,606,411,490	Due to Grantors	9 521,584,755
Accounts Receivable	5	549,582,331	614,302,031	Other Payables	10 -
Other Receivables	6	172,287,766	81,155,860	Taxes Payable	11 12,401,374
A d v a n c e s	7	1,414,673,124	443,410,503	Total Current Liabilities	533,986,129
Total Current Assets		<u>4,219,530,107</u>	<u>3,745,279,884</u>		<u>465,833,217</u>
					<u>5,247,976</u>
					<u>4,527,933</u>
					<u>475,609,126</u>
NON CURRENT ASSETS				NET ASSETS	
Fixed Assets - Net	8	140,555,957	311,777,002	Fund Balances	12 2,185,771,623
				- U n r e s t r i c t e d	2,186,859,799
				- R e s t r i c t e d	1,640,328,312
				Total Net Assets	3,826,099,935
					<u>3,581,447,760</u>
TOTAL ASSETS		<u>4,360,086,064</u>	<u>4,057,056,886</u>	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS	<u>4,360,086,064</u>
					<u>4,057,056,886</u>

See accompanying Notes to Financial Statements
which are an integral part of these Statements

YAPPIKA ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI
STATEMENTS OF ACTIVITIES AND FUND BALANCES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2004 AND 2003

	Notes	2 0 0 4			2 0 0 3		
		Unrestricted Rp	Restricted Rp	Total Rp	Unrestricted Rp	Restricted Rp	Total Rp
REVENUES							
Grants	3a & 13	-	10,979,843,731	10,979,843,731	-	5,816,808,226	5,816,808,226
Others	3a & 14	329,601,833	-	329,601,833	281,254,845	-	281,254,845
Total Revenues		329,601,833	10,979,843,731	11,309,445,564	281,254,845	5,816,808,226	6,098,063,071
EXPENDITURES							
Access	3a	-	1,611,846,488	1,611,846,488	-	-	-
USAID		-	4,625,657,619	4,625,657,619	-	-	-
Ford Foundation		-	-	-	-	18,130,200	18,130,200
Department for International Development (DFID)		-	-	-	-	1,241,624,008	1,241,624,008
Canadian International Development Agency (CIDA) through Unity Service Corporation Canada (USC-Canada) - PPD		-	-	-	-	-	-
Canadian International Development Agency (CIDA) through Unity Service Corporation Canada (USC-Canada) - PPD Phase II		-	-	-	-	951,567,618	951,567,618
Common Ground		-	4,170,089,741	4,170,089,741	-	1,729,914,580	1,729,914,580
Canadian International Development Agency (CIDA)		-	-	-	-	6,514,080	6,514,080
National Democratic Institute (NDI)		-	157,024,958	157,024,958	-	83,326,242	83,326,242
TIFA Foundation (TIFA)		-	-	-	-	127,922,651	127,922,651
TCP 3		-	-	-	-	72,713,930	72,713,930
Partnership		-	246,444,977	246,444,977	-	187,214,243	187,214,243
Administration (Overhead Cost and Fund Raising)		332,178,195	-	332,178,195	-	430,514,098	430,514,098
Total Expenditures		332,178,195	10,811,063,783	11,143,241,978	329,898,351	-	329,898,351
EXCESS OF REVENUES OVER EXPENDITURES (EXPENDITURES OVER REVENUES)		(2,576,362)	168,779,948	166,203,586	(48,643,506)	967,366,576	918,723,070
REVERSED JOURNAL ENTRIES - EQUIPMENT ACQUIRED FROM GRANT FUND TO FIXED ASSETS	8	-	-	-	163,452,080	-	163,452,080
FUND BALANCE, BEGINNING		2,186,859,799	1,394,587,961	3,581,447,760	2,073,045,310	450,006,573	2,523,051,883
CORRECTIONS ON FUND BALANCE	15	1,488,186	76,960,403	78,448,589	(994,085)	(22,785,188)	(23,779,273)
FUND BALANCE, ENDING		2,185,771,623	1,640,328,312	3,826,099,935	2,186,859,799	1,394,587,961	3,581,447,760

See accompanying Notes to Financial Statements
which are an integral part of these Statements

STATEMENTS OF ACTIVITIES AND FUND BALANCES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2004 AND 2003
(in rupiah)

DESCRIPTION	TOTAL	
	2004	2003
RECEIVED		
Fund Donors Contribution		
USAID	4,656,377,662	-
USC - Canada	4,584,022,059	1,569,449,087
ACCESS	1,739,444,010	1,094,988,391
CIDA -JKT	-	606,697,485
DFID	-	1,172,012,924
Partnership	-	279,561,654
NDI	-	37,286,841
TCP3	-	31,830,594
TIFA	-	260,856,170
Ford Foundation	-	508,236,000
AUSAID	-	249,375,000
Commod Ground	-	6,514,080
Sub Total Donors Contribution	10,979,843,731	5,816,808,226
YAPPIKA	329,601,833	281,254,845
Total Received	11,309,445,564	6,098,063,071
EXPENDITURE		
Office Management		
Salary Management (for 14 peoples)	604,876,128	503,610,489
Salary of Program Management (for 15 peoples)	518,793,224	399,700,698
Office cost	618,799,070	578,759,899
Travel and Meeting cost	51,262,150	3,800,000
Upgrading of Staff	11,884,785	96,744,500
Sub total Office Management	1,805,615,357	1,582,615,586
Program Activities		
Partnership program for Development(PPD Ph #1)	-	822,873,602
Partnership program for Development(PPD Ph #2)	3,152,862,746	671,785,602
Facilitating Civic participation in Peaceful Elections in Aceh through the Capacity of Aceh's Civil Society (USAID)	4,308,930,853	-
Civil Society Indeks(ACCESS)	-	-
Civil Society Initiative on Peace Agreement for Aceh (CIDA-JKT)	1,502,420,767	-
National Partner Meeting (DFID)	146,224,958	58,092,502
Pluralism Discussion (Commod Ground)	-	1,241,624,008
Advocacy on Participatory Policy in legislation Making -TCP3	-	6,514,080
NDI	216,120,297	164,683,942
TIFA	-	120,372,807
Partnership	-	72,713,930
YAPPIKA - Support Program	-	341,319,442
	11,067,000	96,744,500
Sub total Program Activities	9,337,626,621	3,596,724,415
Total General Expenditure	11,143,241,978	5,179,340,001
Excess of Revenues over Expenditures (Expenditures over Revenues)	166,203,586	918,723,070
Reversed Journal Entries-Equipment Acquired from Grant to Fixed Asset	-	163,452,080
Fund Balance Beginning	3,581,447,760	2,523,051,883
Correction of Fund Balance	78,448,589	(23,779,273.0)
Fund Balance, Ending	3,826,099,935	3,581,447,760